

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aditya Wiguna Sanjaya, 2023, *Ajaran Kesalahan dalam Hukum Pidana*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.

David Lind Budijanto Njoto, 2019, *Interpretasi Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea dalam Tindak Pidana Korupsi* (Skripsi, Universitas Katolik Darma Cendika Fakultas Hukum).

E. Utrecht, 1960, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada (UGM) Press.

Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing.

Kurniawan Tri Wibowo, Fitrah Akbar Citrawan, dan Sunarko, 2025, *Asas-Asas Hukum Pidana Nasional*, Jakarta/Depok: Papas Sinar Sinanti.

Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Sleman: Deepublish.

-----, 2020, *Buku Ajar Asas-Asas Hukum Pidana*, Cet. 1, Bekasi: Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Mahrus Ali, 2012, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.

Marwan Effendy, 2012, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi dan Tax Amnesty dalam Penegakan Hukum*, Jakarta: Referensi.

Meidy Restu Nugraha, 2024, *Penyalahgunaan Jabatan oleh Kepala Sekolah (Studi Kasus pada SMA Negeri 8 Kota Jambi)* (Skripsi, Jambi: Fakultas Hukum Universitas Batanghari).

Moeljatno, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.

Moeljatno, 2009, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta.

Ratna Nurhayati dan Seno Wibowo Gumbira, 2017, *Pertanggungjawaban Publik dan Tindak Pidana Korupsi*, Semarang: Universitas Terbuka.

Sudarto, 2009, *Hukum Pidana I Edisi Revisi*, Semarang: Yayasan Hukum Sudarto FH Undip.

Soerjono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2004, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-8, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

-----, 2015, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Teguh Prasetyo, Yuni Priskila Ginting, dan Rizky Karo Karo, 2023, *Hukum Pidana: Berlandaskan KUHP 2023, Edisi Revisi*, Depok: Rajawali Pers.

Topo Santoso, 2023, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Depok: Rajagrafindo Persada.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2015 Pedoman Beracara dalam Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi

C. Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 95/PUU-XI/2013.

Putusan 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst

Putusan 68/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst

D. Jurnal

Akbarudin Noor, 2025, "Ultimum Remedium dalam Penegakan Hukum Korupsi Pengadaan di Perusahaan BUMN dibidang Kontruksi", *Bulletin Of Law Research (BLEACH)*, Vol. 2, No. 2.

Andi Bau Mallarangeng, dkk., 2023, "Pembuktian Unsur Niat Dikaitkan Dengan Unsur Mens Rea Dalam Tindak Pidana Korupsi", *LEGAL: Journal of Law*, Vol. 2, No. 2.

Andi Sopian Ibrahim dan Idris, 2025, "Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Wewenang dalam Administrasi Pemerintahan: Tinjauan Berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan", *Jurnal Rectum*, Vol. 7, No. 1.

Aris Munandar dkk., "Peran Niat (Mens rea) dalam Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia," *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, Vol. 1, No. 3, Oktober 2024.

Artidjo Alkostar, 2013, "Korupsi sebagai Extraordinary Crime" (Makalah, Workshop Pengarusutamaan Pendekatan HAM dalam Pemberantasan Korupsi, Yogyakarta).

Benny Irawan, 2011, "Diskresi Sebagai Tindak Pidana Korupsi. Kajian Kriminologi Dan Hukum Terhadap Fenomena Pejabat Otoritas," *Jurnal Mimbar*, Vol. XXVII, No. 2.

- David Lind Budijanto Njoto, 2024, "Rekonstruksi Asas Actus Non Facit Reum Nisi Mens Rea dalam Tindak Pidana", *JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, Vol. 7, No. 3.
- Dini Wahyuni, dkk., 2026, "Implikasi Konflik Teori Hukum Positivisme-Naturalisme dalam Putusan Kasus ASDP Ira Puspawati", *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)*, Vol. 4, No. 4.
- Erman Radjagukguk, 2006, "Pengertian Keuangan Negara dan Kerugian Negara" (Makalah, disampaikan dalam Diskusi Publik "Pengertian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi", Komisi Hukum Nasional RI, Jakarta, 26 Juli).
- Febriy Nurphi, Elly Sudarti, dan Elizabeth Siregar, 2026, "ANALISIS PENETAPAN MENS REA DAN UNSUR SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIL DALAM KASUS KORUPSI IMPOR GULA TOM LEMBONG", *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 7, No. 7.
- Firwanda Sandi Pradipta dan Ermania Widjajanti, 2025, "Pembaharuan Hukum Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan BUMN Pasca Revisi UU No 1 Tahun 2025", *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 4, No. 2.
- Henny Juliani, 2020, "Pertanggungjawaban Pejabat Pemerintahan Sebagai Akibat Penyalahgunaan Wewenang Yang Menimbulkan Kerugian Negara," *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2, No. 1.
- Iqbal Rahmansyah Yusuf, dkk., 2026, "Tinjauan Yuridis Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Negara", *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan*, Vol. 31, No. 1.
- Kevin Verrell Nurreyhan, dkk., 2024, "Menakar Diskresi Hakim dalam Pemidanaan Kebijakan Publik", *Jurnal Hukum Pidana Indonesia*, Vol. 1, No. 2.
- Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, 2020, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1.
- Kukun Abdul Syakur Munawar, 2015, "PEMBUKTIAN UNSUR NIAT DIKAITKAN DENGAN UNSUR MENS REA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI", *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Vol. 3, No. 2.

- M. Musa dan Heni Susanti, 2022, “PENALARAN HAKIM TENTANG PENYERTAAN TINDAK PIDANA DALAM KASUS KORUPSI PENGADAAN VIDEOTRON Kajian Putusan Nomor 36/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Jkt.Pst”, *Jurnal Yudisial*, Vol. 15, No. 1.
- Marsudi Utoyo dan Kinaria Afriani, 2020, “Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana Indonesia,” *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, Desember.
- Mhd Taufiqurrahman, 2024, “Kebijakan Diskresi Pejabat Pemerintahan Dalam Memutuskan Kebijakan Publik”, *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 3, No. 1.
- Muhammad Khaerul Luthfi, 2024, “Pertanggungjawaban atas Penggunaan Diskresi oleh Pejabat Pemerintah dari Sudut Pandang Hukum Administrasi Negara,” *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)*, Vol. 1, No. 4, Juli.
- Putri Martha, Jenifer Kiara, dan Asmak Ul Hosnah, 2025, “ANALISIS YURIDIS TERHADAP KETIADAAN UNSUR MENS REA DALAM PUTUSAN KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI THOMAS TRIKASIH LEMBONG DAN RELEVANSINYA DENGAN PEMBERIAN ABOLISI OLEH PRESIDEN”, *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 8, No. 3.
- Rahmat Aiman dan Andi Nurul Tenriwali Hasanuddin, 2025, “Penegasan Unsur Kerugian Negara dan Mens rea dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, *Peradaban Journal of Law and Society*, Vol. 4, No. 2, Edisi Desember.
- Rena Yulia dan Duke Arie Widagdo, 2023, “Penyalahgunaan Wewenang: Perspektif Hukum Administrasi dan Viktimologi,” *Jurnal Veritas et Justitia*, Vol. 9, No. 3.
- Rizky Putradinata, Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Laila Mulasari, 2016, “Pertanggungjawaban Pidana Pejabat Pembuat Kebijakan (Policy Maker) atas Diambilnya Kebijakan yang Menimbulkan Kerugian Keuangan Negara”, *Diponegoro Law Journal*, Vol. 5, No. 3.
- Rocky Marbun dan Maisha Ariani, 2022, “Melacak Mens Rea dalam Penyebaran Berita Bohong Melalui WhatsApp Group: Mengenal Sekilas Psikolinguistik dalam Hukum Pidana”, *Jurnal Hukum Pidana & Kriminologi*, Vol. 3, No. 2.
- Septa Candra, 2013, [Judul Artikel Belum Tercantum Lengkap], *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1, No. 1.

Shulhan Iqbal Nasution, 2025, "MENS REA: FONDASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA", *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 7, No. 1.

Usman Saputra, Edi Saputra Hasibuan, dan Marlina Samosir, 2026, "Penerapan Unsur Mens Rea dalam Tindak Pidana Korupsi Berbasis Kebijakan Publik: Studi Kasus Tom Lembong", *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Ilmu*, Vol. 3, No. 1.

Vaulus Julianta Nano, Tahasak Sahay, dan Claudia Yuni Pramita, 2026, "Analisis Teoritis Dolus dan Culpa Dalam Konsep Kesalahan sebagai Dasar Pertanggungjawaban Pidana", *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, Vol. 4, No. 2.

E. Internet

Aida Mardatillah, 2024, "Duduk Perkara Impor Gula yang Menjerat Tom Lembong Menjadi Tersangka Korupsi", *Hukumonline*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/duduk-perkara-impor-gula-yang-menjerat-tom-lembong-menjadi-tersangka-korupsi-lt6722348f81f5e/>.

Aji Prasetyo, 2026, "Divonis 4,5 Tahun Penjara di Kasus Impor Gula, Tom Lembong: Saya Terbukti Tidak Punya Mens Rea", *Hukumonline*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/divonis-4-5-tahun-penjara-di-kasus-impor-gula--tom-lembong--saya-terbukti-tidak-punya-mens-rea-lt687a4dbbcd428/>.

Anugerah Rizki Akbari, 2016, *Potret Kriminalisasi di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2016/01/Potret-Kriminalisasi-di-Indonesia-Pasca-Reformasi.pdf>.

Asep Bidin Rosidin, 2026, "KPK Beberkan Duduk Perkara dan Perbuatan Melawan Hukum Ira Puspawati dalam Akuisisi PT JN oleh ASDP",

Pikiran Rakyat, <https://www.pikiran-rakyat.com/news/pr-019822774/kpk-beberkan-duduk-perkara-dan-perbuatan-melawan-hukum-ira-puspadewi-dalam-akuisisi-pt-jn-oleh-asdp>.

CNN Indonesia, 2025, “Hakim: Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi Tak Terima Keuntungan Finansial”, *CNN Indonesia*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20251120150950-12-1297569/hakim-eks-dirut-asdp-ira-puspadewi-tak-terima-keuntungan-finansial>.

Dipna Videlia Putsanra, 2026, “Kronologi Kasus Ira Puspadewi dari ASDP hingga Rehabilitasi”, *Tirto.id*, <https://tirto.id/kronologi-cases-ira-puspadewi-dari-asdp-hingga-rehabilitasi-hmzE>.

Eko Putra Bangun, 2026, “Menembus Teks Hukum: Hakim dalam Paradigma Baru KUHP Nasional”, *Dandapala*, <https://dandapala.com/opini/detail/menembus-teks-hukum-hakim-dalam-paradigma-baru-kuhp-nasional>.

Haris Fadhil, 2026, “Alasan Hakim Tetap Hukum Tom Lembong Meski Tak Nikmati Hasil Korupsi”, *Detiknews*, <https://news.detik.com/berita/d-8020002/alasan-hakim-tetap-hukum-tom-lembong-meski-tak-nikmati-hasil-korupsi>.

Havis Fajar Akmal, 2026, “Diskresi di Tengah Risiko Tindak Pidana Korupsi, Mengapa Hukum Administrasi Tetap Dibutuhkan?”, *Hukumonline*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/diskresi-di-tengah-risiko-tindak>

pidana-korupsi--mengapa-hukum-administrasi-tetap-dibutuhkan-
lt69d8686d81c6e/.

MKRI, 2026, “Ahli Presiden: Kerugian Keuangan Negara dalam Tipikor Harus Dibuktikan Secara Nyata”, *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, <https://www.mkri.id/berita/ahli-presiden%3A-kerugian-keuangan-negara-dalam-tipikor-harus-dibuktikan-secara-nyata-23542>.

Pradikta Andi Alvat, 2025, “Pertanggungjawaban Pidana dan Mens Rea”, *Mari News Mahkamah Agung RI*, <https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/pertanggungjawaban-pidana-dan-mens-rea-0v5>.

Suhartono, 2026, “MENS REA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI”, *Kemenkeu Learning Center*, <https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/mens-rea-dalam-tindak-pidana-korupsi-45a90e3f/detail/>.

Tempo, 2026, “KPK Jabarkan Kesalahan Ira Puspadewi dalam Kasus Korupsi ASDP”, *Tempo.co*, <https://www.tempo.co/hukum/kpk-jabarkan-kesalahan-ira-puspadewi-dalam-kasus-korupsi-asdp-2093798>.

Transparency International, 2025, “Corruption Perceptions Index 2024”, *Transparency International*, <https://www.transparency.org/en/cpi/2024>.

Willa Wahyuni, 2026, “Mengenal Unsur Mens Rea dalam Praktik Peradilan”, *Hukumonline*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-unsur-mens-rea-dalam-praktik-peradilan-lt6891cfd2705a0/>.